

**LAPORAN PENELITIAN
DOSEN PEMULA**



**Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan
Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto**

Oleh:

**NORA EKA PUTRI, S.IP, M.Si (Ketua)
Dra. JUMIATI, M.Si (Anggota)
MESA NOVITA SARI (Anggota)
AHMAD DENI (Anggota)**

**Dibiayai DIPA: Universitas Negeri Padang
Nomor: 422/UN35.2/PG/2012 Tanggal 25 Juli 2012**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2012

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto

Bidang Ilmu : Kebijakan Berbasis Gender

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : **Nora Eka Putri, S.IP, M.Si**
- a. NIP : 19850312 200812 2 006
- b. NIDN : 0012038501
- c. Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk I/ III b
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Fakultas / Jurusan : FIS / Ilmu Administrasi Negara
- f. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
- g. Alamat Institusi : Jl Prof Hamka Komp UNP Air Tawar Padang
- h. Telp/ Fax/Email : 0751 445187

Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : **Dra Jumiati, M.Si**
- b. NIP : 196211091986022001
- c. NIDN : 0009116208
- d. Pangkat/ Golongan : Penata Tk I/III d
- e. Disiplin Ilmu : Ilmu Administrasi Negara
- f. Jabatan Fungsional : Lektor
- g. Fakultas / Jurusan : FIS / Ilmu Administrasi Negara
- h. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang

Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

Biaya yang Diperlukan : Rp. 7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)

Padang, 21 November 2012

Mengetahui,
Dekan FIS UNP

Ketua Peneliti,

Prof.Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP.19621001 198903 1 002

Nora Eka Putri, S.IP, M.Si
NIP.19850312 200812 2 006

Mengetahui/ Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002

**HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PROSES PENELITIAN DOSEN PEMULA**

No	Nama Mahasiswa	NIM	Bentuk Keterlibatan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Mesa Novita Sari	12918	Pengumpul Data	
2	Ahmad Deni	197320	Pengumpul Data	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk kegiatan yang memuat aktivitas penulis yang telah menempuh beberapa tahapan dalam rangkaian proses penelitian berdasarkan rentang waktu yang telah ditetapkan.

Penulis menyadari bahwa terdapat kelemahan dan kekurangan selama proses penelitian berlangsung dan dalam penyusunan laporan. Tentunya diharapkan saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak demi pengembangan materi ini untuk masa yang akan datang. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, terutama kepada tim peneliti dan mahasiswa yaitu Mesa Novita sari dan Ahmad Deni atas partisipasinya dalam pengumpulan data penelitian tentang Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Tenun Silungkang di Kota Sawahlunto. Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dan pengrajin tenun Silungkang dan pihak lain yang membantu dalam proses penelitian sampai dengan penyelesaian laporan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan keilmuan ke depan.

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya, kerajinan tenun tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat sekaligus menambah pendapatan asli daerah. Namun dalam realisasi, industry kerajinan tenun Silungkang justru belum sepenuhnya menjawab persoalan yang social ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Perempuan belum mendapatkan kesempatan yang luas dalam pengelolaan tenun tersebut. Hal itu disebabkan karena produksi tenun Silungkang yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto pada awalnya menggunakan Alat Tenun Mesin (relative difungsikan oleh laki-laki), dan lain sebagainya, sehingga penting untuk melahirkan kebijakan yang berbasis gender. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender, kebijakan. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya analisa masalah dengan analisa deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto belum teregulasi dengan baik namun dalam implementasi pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh masyarakat Silungkang telah sejak lama menjadikan pengelolaan tenun sebagai tanggungjawab semua masyarakat termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun tersebut. Pelaksanaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 juga belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sehingga belum ditemukan Peraturan daerah atau regulasi lain yang terkait dengan gender.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Halaman Keterlibatan Mahasiswa	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERUMUSAN MASALAH	4
BAB III TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI	7
BAB IV TINJAUAN PUSTAKA	
4.1 Gender	8
4.2 Pengarusutamaan Gender	8
4.3 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	11
4.4 Kebijakan	12
4.5 Kerangka Konseptual	19
BAB V METODE PENELITIAN	
5.1 Jenis Penelitian	20
5.2 Lokasi Penelitian	20
5.3 Operasional Konseptual Penelitian	20
5.4 Informan Penelitian	21
5.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
5.6 Teknik Analisa	23
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	
6.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	24
6.2 Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang	28
6.3 Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008	38
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1 Kesimpulan	44
7.2 Saran	45
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Pendataan Terhadap Kepala Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Modal	5
Tabel 6.1 Luas Kecamatan Silungkang Menurut Desa Tahun 2006	24
Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Pertahun Dirinci Menurut Jenis Kelamin	25
Tabel 6.3 Jumlah Pengrajin Tenun Songket Silungkang Tahun 2012 Dirinci Menurut Desa	25
Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Berdasarkan Kelompok Umur	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Alat Tenun Bukan Mesin Tenun Silungkang	26
Gambar 6.2 Hasil Kerajinan Tenun Silungkang dengan Berbagai Motif	28
Gambar 6.3 Toko Penjualan Hasil Tenun Silungkang	31
Gambar 6.4 Kampung tenun Silungkang, Kota Sawahlunto	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial)
- Surat Izin Penelitian Lembaga Penelitian UNP kepada KesbangPol Kota Sawahlunto
- Surat Izin Penelitian dari KesbangPol Kota Sawahlunto kepada Lembaga/ Individu informan penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan gender yang dimaknai sebagai upaya untuk membuat program pembangunan lebih peka dan responsif gender memberikan peranan penting dalam mengakomodasi kepentingan dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, sebab setiap kebijakan yang dilahirkan juga bersinggungan dengan kepentingan kaum perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan sebenarnya dapat dilihat melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah atau bahkan melalui lembaga-lembaga mandiri yang bergerak di berbagai sektor kehidupan (politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya). Pelaksanaan pembangunan berbasis gender sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah sejak lama, akan tetapi di dalam implementasinya dominasi patriarki tidak dapat dielakkan, contohnya adalah dalam analisa kepangkatan sistem birokrasi di Indonesia mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk BUMN, jabatan-jabatan strategis relatif lebih banyak dipegang oleh pria meskipun sebenarnya birokrat perempuan juga memiliki kualitas yang mumpuni. Selanjutnya dalam berbagai survey dan penelitian yang dilakukan di Indonesia, perbandingan jumlah anggota legislatif laki-laki dan anggota legislatif perempuan sangat jauh berbeda, jika dipersentasikan rata-rata jumlah anggota legislatif perempuan di Indonesia di bawah lima belas persen (15%).

Hal tersebut semakin menjelaskan proporsionalitas dalam pengambilan kebijakan atau implementasi kebijakan berbasis gender dinilai belum signifikan sebab keterwakilan perempuan di lembaga legislatif atau birokrasi belum proporsional sehingga akibat yang

ditimbulkan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan relatif bias gender. Sejak digulirkannya otonomi daerah kontribusi perempuan seyogyanya dapat diakomodasi dengan baik terutama dalam pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan dalam pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah), semestinya memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu pengarusutamaan gender dalam kebijakan yang dilahirkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian penting di setiap daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat adalah sektor ekonomi kerakyatan terutama yang bergerak di industri rumah tangga seperti kerajinan tenun dan keterampilan tradisional lainnya. Kerajinan tenun memiliki prospek cerah dalam dunia industry baik industry local maupun secara global, kerajinan tenun merupakan salah satu identitas daerah atau suku bangsa atau dalam skala yang lebih besar adalah potensi budaya yang dapat dipromosikan secara internasional apalagi dalam era perdagangan bebas saat ini. Sebagai salah satu kekayaan bangsa, potensi tersebut harus dijaga kelestariannya dan kualitasnya harus ditingkatkan sehingga secara ekonomi kerajinan tersebut juga memiliki daya saing tinggi. Selanjutnya perlu regulasi yang jelas dan tegas agar kekayaan bangsa tersebut tidak dicurangi oleh pihak lain sebagaimana kasus-kasus klaim atau hak paten yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap potensi dan kekayaan bangsa Indonesia misalnya makanan, kerajinan, tari tradisional dan lain sebagainya.

Selanjutnya kerajinan tenun khususnya di Sumatera Barat sangat akrab dengan dunia perempuan, misalnya tenun Silungkang, tenun Pandai Sikek, dan lain-lain. Hal tersebut sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun, meskipun tidak dipungkiri saat ini kebiasaan atau budaya bertenun di kalangan perempuan Sumatera Barat (khususnya suku Minangkabau) sudah mulai memudar, sedikit demi sedikit adat istiadat tergerus oleh berbagai faktor misalnya globalisasi, pesatnya perkembangan informasi dan teknologi yang memberikan pilihan atau alternatif lain bagi perempuan Minangkabau dalam beraktivitas, sehingga kerajinan tenun semakin tertinggal dan relatif tidak akrab lagi bagi sebagian besar perempuan Minangkabau. Saat ini secara umum kerajinan tenun termasuk tenun Silungkang di Sawahlunto masih dilakukan namun terkadang belum terkelola dengan baik dengan manajemen pemasaran yang sistematis sehingga industri rumah tangga tersebut relatif belum berkembang. Tenun Sillungkang dinilai sebagai salah satu industri rumah tangga yang memiliki perkembangan pesat di masa mendatang.

BAB II

PERUMUSAN MASALAH

Kerajinan tenun Silungkang, Sawahlunto merupakan kerajinan tenun khas Nagari Silungkang yang sudah ada sejak lama. Kerajinan tenun Silungkang sebenarnya sudah dikenal luas bahkan sampai ke luar negeri namun pengelolaannya belum terlalu baik. Dari segi jumlah pengrajin tenun di Silungkang yang ada sekarang adalah sekitar 310 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dan jika ada yang mampu mengekspor ke luar negeri, hal itu dilakukan secara individual, belum terlembaga dan dalam jumlah yang relatif kecil (individual tersebut terdiri dari pengusaha-pengusaha tenun di Silungkang yang belum terdata dengan baik) . Sementara potensi tenun Silungkang cukup besar. Oleh karena itu sangat diharapkan peranan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pengelolaan tenun Silungkang secara baik.

Kemampuan pengusaha lokal dalam mengelola usaha perekonomian terutama dalam industri kerajinan tenun Silungkang mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui pemerintah di kota Sawahlunto. Beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti pemberian pelatihan mengenai tenun songket melalui dinas koperasi dan perdagangan kota Sawahlunto pada tanggal 14 s/d 21 Juni 2011 (Reza, 2011). Dukungan lain dengan pemberian bantuan usaha dari pemerintah kepada para pengusaha tenun di silungkang. Bantuan dana usaha yang diberikan untuk daerah Silungkang cukup besar dibandingkan 3 kecamatan lain di Kota Sawahlunto seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Hasil Pendataan Terhadap Kepala Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Modal

Kecamatan	Jumlah KK mendapatkan bantuan modal	Jumlah KK keseluruhan	Persentase (%)
Talawi	219	4.763	4 %
Barangin	375	4.643	8 %
Lembah Segar	405	3.278	12,3 %
Silungkang	330	2.635	12,52 %

Sumber Kantor KB Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sawahlunto 2011

Namun pemberian bantuan usaha saja dinilai belum maksimal dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang. Diperlukan peran lain, dimulai dari pengambilan kebijakan yang mengutamakan gender dalam meningkatkan kerajinan tenun Silungkang sehingga pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat. Di Sumatera Barat, pada masing-masing nagari, terdapat *bundo kanduang* (lembaga yang mewadahi kepentingan perempuan dalam adat Minangkabau), misalnya wadah perempuan tersebut dapat memberikan ide dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan terkait dengan tenun Silungkang yang berbasis gender, misalnya melalui Badan Musyawarah Nagari, prospek kerajinan tenun tersebut sangat menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerajinan rakyat yang sudah berlangsung sejak lama dan turun temurun ini perlu pengelolaan yang lebih baik agar kelestarian kemudian promosi serta pendistribusiannya lebih baik dari sebelumnya, oleh sebab itu, kaum perempuan yang terlibat aktif dalam kerajinan tenun tersebut dinilai lebih memahami dan mengetahui dengan baik upaya peningkatan pengelolaan tenun Silungkang oleh pemerintah melalui Badan Musyawarah Nagari. Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan kajian terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang, Nagari Silungkang, Kota Sawahlunto.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto?

BAB III

TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto. Selanjutnya apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka luaran yang diharapkan dari penelitian adalah hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk *proceeding* dan atau menjadi salah satu referensi dalam kajian kebijakan gender dan khususnya juga dapat memberikan masukan dalam upaya mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto. Selain itu menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan bagi pihak yang berkepentingan dan pegiat gender, lebih jauh sebagai upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian gender khususnya yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan.

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

4.1 Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi social budaya¹. Gender menjadi istilah simpul untuk menyebut kefemininan (bersifat keperempuanan) dan kemaskulinan (bersifat kekelakian) yang dibentuk secara sosial, yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun waktu lainnya, dan juga berbeda-beda menurut tempatnya. Berbeda dengan seks, perilaku gender adalah perilaku yang tercipta melalui proses pembelajaran, bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri secara alamiah atau takdir yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia (Macdonald,dkk,1999)

Indikator Gender:

- Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah **menghilang** atau berkurang; dan/atau
- Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku dan nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan, di internal lembaga; dan/atau
- Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, dan/atau di masyarakat.

4.2 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender tidak hanya berarti mengintegrasikan permasalahan gender sebagai aspek pembangunan, tetapi juga upaya untuk membuat program pembangunan lebih peka dan responsif gender. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai:

¹ Gender and Politics. Pusat Studi Wanita Univ Gadjah Mada. 2009. Yogyakarta: Tiara Wanita hlm 165

Proses penilaian terhadap dampak suatu kegiatan pembangunan termasuk dampak dari suatu pembuatan peraturan, kebijakan dan program bagi laki-laki dan perempuan di semua tingkatan. Pengarusutamaan gender adalah strategi agar kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari program yang dibuat sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama.

Sesuai dengan definisi pengarusutamaan gender di atas seharusnya penentuan kebijakan di era otonomi daerah juga memperhatikan isu gender sehingga dalam melahirkan sebuah kebijakan yang tidak bias gender atau terjadi kesenjangan gender. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bahwa semua departemen termasuk birokrasi daerah harus menerapkan pengarusutamaan gender.

Dalam realisasinya dilakukan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Perempuan di tingkat daerah. Akan tetapi adanya lembaga yang akan mewadahi upaya pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender belum menjamin akan terwujudnya kesetaraan gender dalam penentuan kebijakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan yang mencerminkan pengarusutamaan gender dan peranan perempuan terutama penentuan kebijakan dalam otonomi daerah.

Adapun langkah yang dijadikan acuan dalam menerapkan pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan dalam otonomi daerah adalah²:

² Ani Widayanti Sucipto. Politik Perempuan Bukan Gerhana Penerbit Buku Kompas.2005, hlm 294-296

1. Perencanaan, Pembuatan dan Pelaksanaan

Dalam tahapan perencanaan diperlukan data statistik yang terpilih menurut jenis kelamin. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan menganalisa mengapa kesenjangan tersebut terjadi. Kebijakan kemudian dapat diformulasikan ulang agar menjadi lebih peka pada kebutuhan perempuan. Tahapan selanjutnya diikuti dengan rencana kerja untuk mempersempit kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Data menjadi input utama terhadap analisis gender pada tahapan pembuatan kebijakan.

2. Penerapan

Penerapan program dan kebijakan yang responsive gender dapat bervariasi sesuai dengan kondisi setempat. Untuk memastikan bahwa penerapannya akan sesuai dengan kebutuhan perempuan sebagaimana laki-laki keduanya harus dilibatkan dalam manajemen kegiatannya dan harus ada koordinasi antara *stakeholders* di semua tingkatan

3. Partisipasi

- Siapa yang menjadi target, apakah perempuan atau laki-laki dan perempuan
- Siapa yang menjadi partisipannya, tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan harus disusun berdasarkan catatan administrative sebagai komponen penting dalam memahami respon laki-laki dan perempuan dalam kebijakan tersebut
- Siapa yang akan memperoleh manfaatnya? studi di lapangan mendalam harus dilakukan untuk menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

4. Manajemen

Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengorganisasian dan pengawasan adalah indikator partisipasi perempuan dalam manajemennya. Melakukan advokasi efektif kepada agen-agen pengarusutamaan gender di semua tingkatan nasional sampai ke kabupaten/ kota untuk menjamin proses pengarusutamaan gender dan kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan kegiatannya akan meningkatkan program responsive gender

5. Pengawasan dan Evaluasi

- Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif mengenai kebijakan atau program rsponsif gender
- Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun indicator output-yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan
- Ada kebutuhan indicator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif mempersempit atau meminimalisasi kesenjangan gender.

4.3 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 diawali dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Selanjutnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, di antaranya terdiri dari:

- Bappeda mengkoordinasi penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berspektif Gender.
- Badan, Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.
- Analisis Gender terhadap rencana kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.

4.4 Kebijakan

Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (*Public policy*) adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (N. Dunn, 2000:132). Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik (Kencana, 1999:106). Dengan demikian suatu kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Selanjutnya manakala dilakukan analisa kebijakan pemerintah menurut Ealau dan Pewitt (dalam Edi Suharto, 2008:7) dapat menggunakan pendekatan teori sebagai berikut :

- 1) Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Lain halnya dengan teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah, demikian pandangan teori elit. Sedang teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
- 2) Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
- 3) Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai kebijakan pemerintah, demikian pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, lingkungan dipandang sebagai input dari sistem politik, sedangkan *public policy* dipandang sebagai output dari sistem politik.
- 4) Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental. Hubungan kewenangan politik, administrasi dan kepentingan umum dapat dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan menggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu *survival style*, *rasionalist style*, *reactive style*, *prescriptive style*, dan *proactive*

style. Perumusan usulan kebijakan pemerintah dimulai dari perumusan masalah secara tepat. Sering kali para pembuat kebijakan, karena kapasitasnya terbatas tidak mampu menemukan masalah-masalah dengan baik. Kesalahan di dalam melihat dan mengidentifikasi masalah akan berakibat pada perumusan masalahnya, yang tentu akan berakibat panjang pada fase-fase berikutnya. Jumlah masalah yang ada di masyarakat begitu banyak dan tidak ada habis-habisnya. Dari sekian banyak masalah hanya sedikit saja yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan, yang tercermin pada agenda pemerintah. Sedangkan langkah selanjutnya adalah memproses usulan-usulan kebijakan pemerintah (*policy proposals*). Perumusan usulan kebijakan tersebut meliputi kegiatan mengidentifikasikan alternatif, mendefinisikannya dan menemukan alternatif.

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi *implementation gap* dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana *implementation gap* merupakan kondisi adanya suatu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai (Dunsire, 1978). Menurut Alfian dkk (1980) bahwa proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari 3 (tiga) sudut pandang: (1) Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center*), di mana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnya/ daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran. (2) Pejabat-pejabat di lapangan (*the periphery*) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di

lapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. (3) Kelompok sasaran (*target group*) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya. Proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program, dan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, juga sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Kebijakan sebagai arah tindakan yang dapat di pahami secara lebih baik bila konsepnya di rinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut dikemukakan menurut Budi Winarno, 2007 antara lain :

1. Tuntunan-tuntunan kebijakan (*policy demands*)

Tuntunan-tuntunan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntunan-tuntunan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan-tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik.

3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Pernyataan-pernyataan resmi atau atribusi-atribusi kebijakan publik.

4. Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*)

Lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

5. Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomens*)

Lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mengandung tujuan dengan melibatkan seseorang atau sekelompok orang sebagai pelaksana kebijakan, yang dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat atau untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Model kebijakan (*policy models*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan ini merupakan penyederhanaan sistem masalah (*messes*) dengan membantu mengurangi kompleksitas-kompleksitas dan menjadikannya dapat di kelola oleh para analisis kebijakan. Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari suatu masalah, mempertegas hubungan diantara faktor-faktor atau fariabel-fariabel penting dan membantu menjelaskan dan memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model-model kebijakan juga dapat memainkan para kreatif dengan kritis di dalam analisis kebijakan dengan mendorong para analisis untuk membuat asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri dan untuk menentang ide-ide konvensional (Dunn, 2003). Berikut beberapa model-model kebijakan oleh Forrester (dalam Dunn : 2003-232) yaitu:

1) Model Deskriptif

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau memprediksikan sebab-sebab konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.

2) Model Normatif

Tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan dan atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (*nilai*).

3) Model Verbal

Dalam menggunakan model verbal, analisisnya berdasarkan pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.

4) Model Simbolis

Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya untuk mencari suatu masalah.

5) Model Prosedural (*Prosedural Models*)

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

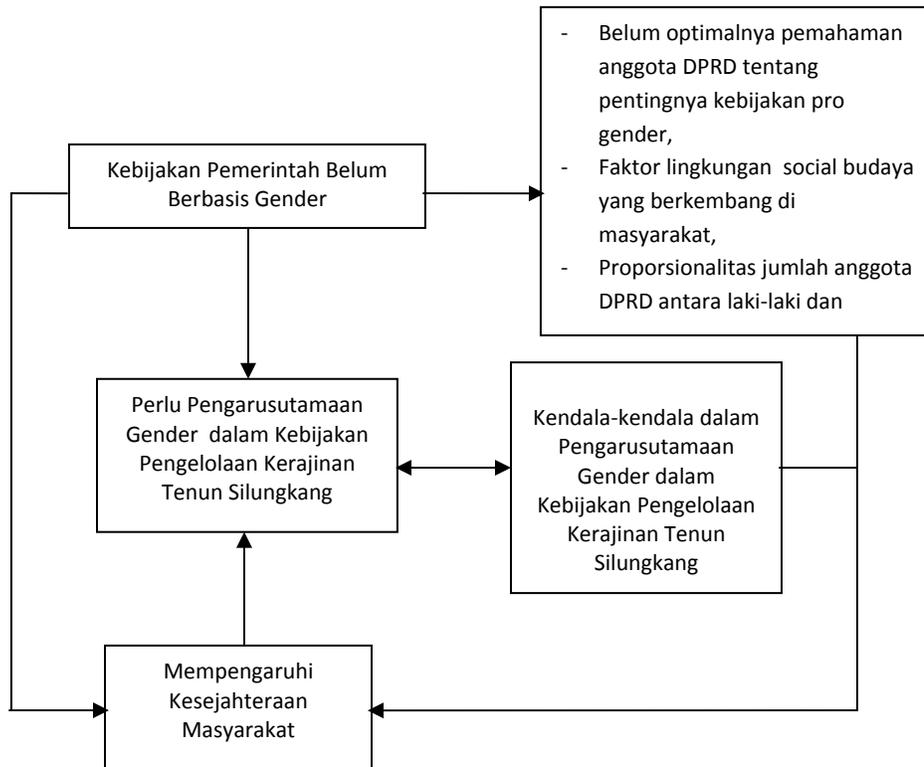
6) Model Sebagai Pengganti dan Prespektif

Model kebijakan lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat di pandang sebagai pengganti (*surrogates models*) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya model pengganti (*surrogates models*) dipandang sebagai satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif.

Sebelum melihat hasil kebijakan keluaran maupun dampak kebijakan, kita lihat dulu tindakan kebijakan apa yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama yaitu *regulasi* dan *alokasi*, tindakan *regulasi* adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya tindakan *alokatif* adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat. Baik tindakan regulatif maupun redistributif. Tindakan regulatif dan alokatif diimplementasikan oleh badan-badan federal, negara bagian dan kabupaten dalam bentuk program dan proyek. Tindakan kebijakan dapat pula dipilih menjadi masukan (*input*) kebijakan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan berupa sumber daya, uang, personil, alat, materil yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak dari kebijakan.

Dalam memantau hasil kebijakan harus dibedakan antara dua jenis akibat keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacs*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok penerima (*beneficiares*). Sebaliknya, *dampak kebijakan* merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa sekelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. *Kelompok sasaran (target group)* adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, sedangkan *penerima (beneeficiares)* adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut (Blau dan Marshall, 1987).

4.5 Kerangka Konseptual



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirl dan Miller penelitian kualitatif tergantung pada pengamatan terhadap manusia atau orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti³. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati⁴.

5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Nagari Silungkang, dan Pemerintah Kota Sawahlunto

5.3 Operasional Konseptual Penelitian

Agar penelitian ini terbingkai dengan baik, maka perlu diberikan batasan dan operasional konsep sehingga penelitian yang dilakukan lebih terfokus. Adapun operasional konseptual penelitian, sebagai berikut:

- a. Pengarusutamaan gender, yaitu kebijakan yang dirumuskan dalam pengelolaan tenun Silungkang harus memperhatikan aspek gender
- b. Tenun Silungkang, kerajinan rakyat di Nagari Silungkang dari bahan kain yang kemudian dikembangkan sebagai salah satu industri professional di Kota Sawahlunto
- c. Pegiat dan aktivitas tenun Silungkang, pihak yang menjadi pengrajin tenun Silungkang atau yang memiliki perhatian lebih terhadap perkembangan tenun Silungkang

³ Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 2

⁴ Ibid., hlm. 3

- d. Kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Sawahlunto yang mengakomodasi pengelolaan tenun Silungkang menjadi lebih baik dan profesional

5.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu atau paling diharapkan dalam penelitian⁵. “*Purposive sampling*” juga bisa diartikan teknik pengambilan informan secara khusus berdasarkan tujuan penelitian⁶. Sesuai dengan pendekatan penelitian, yang menjadi informan penelitian adalah:

- a. Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Sawahlunto (Komisi yang terkait)
- b. Kepala Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dan Kabag Industri
- c. Pegiat Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang
- d. Tokoh Masyarakat Nagari Silungkang

5.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini instrument dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara

Wawancara, Wawancara menurut Esternberg merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna melalui topik tertentu⁷. Susan Stainback mengemukakan dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam

⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 54

⁶ Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 47

⁷ Sugiyono, op.cit., hlm. 72

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dan tidak bisa ditemukan melalui observasi⁸. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti mengemukakan draft pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan permasalahan penelitian⁹.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu¹⁰. Dokumen dapat berupa tulisan seperti peraturan kebijakan, artikel. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, sketsa. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan teknik wawancara.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti¹¹. Dalam penelitian kualitatif realitas data tidak bersifat tunggal tapi majemuk, dinamis. Untuk melakukan pengujian validitas terhadap penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji kredibilitas¹². Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan triangulasi. Menurut William Wierma, triangulasi data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu¹³. Selanjutnya triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dilakukan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait lainnya (Pegiat kerajinan tenun Silungkang, Tokoh Masyarakat Nagari Silungkang, dan lain sebagainya).

5.6 Teknik Analisa

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., hlm. 73

¹⁰ Sugiyono, op.cit., hlm. 82

¹¹ Ibid., hlm. 119

¹² Ibid., hlm. 121

¹³ Ibid., hlm. 125

Menurut Bogdan, analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁴. Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menginterpretasikannya melalui perpektif etik yaitu pengetahuan peneliti tentang masalah penelitian, di samping itu juga dilakukan interpretasi emik yaitu ungkapan yang disampaikan oleh informan berupa pendapat atau informasi menurut pandangannya sendiri¹⁵. Analisa data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisa data yaitu:

- Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dicari tema dan polanya.
- Penyajian data, ini dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- Kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penulisan hasil wawancara dipaparkan sebagaimana yang dituturkan informan kemudian dibahas oleh peneliti dengan pengetahuan yang berpedoman pada paradigma, teori, pendapat ilmiah yang menunjang informasi dari informan.

¹⁴ Ibid., hlm. 88

¹⁵ Moleong, op.cit., hlm. 82-83

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Silungkang merupakan kecamatan yang berada di pinggir Kota Sawahlunto terletak 100,48⁰ BT 0,41⁰ LS . Secara geografis, letaknya persis di sebelah Kabupaten Solok yang berdampingan dengan Kecamatan IX Koto Sungailasi. Daerah Silungkang merupakan sentra kerajinan songket di daerah Sumatera Barat, mempunyai topografi daerah berbukit-bukit dengan luas wilayah sekitar 32, 93 Km². Kecamatan Silungkang terdiri dari lima desa yaitu desa Silungkang Oso, Taratak Bancah, Muarokalaban, Silungkang Tigo, dan Silungkang Duo. Luas daerah masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Luas Kecamatan Silungkang Menurut Desa Tahun 2006

No	Desa	Luas Daerah (Km ²)
1	Silungkang Oso	6,57
2	Taratak Bancah	8,43
3	Muarokalaban	8,58
4	Silungkang Tigo	5,13
5	Silungkang Duo	4,22
	Luas keseluruhan	32,93

Sumber : Kecamatan Silungkang dalam Angka

Jumlah penduduk kecamatan Silungkang dari tahun 2003 hingga 2006 terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Pertahun
Dirinci Menurut Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2003	4.343	4.712	9.055
2	2004	4.313	4.794	9.107
3	2005	4.355	4.835	9.190
4	2006	4.411	4.868	9.279

Sumber BPS Kota Sawahlunto

Di Silungkang yang terdiri dari 18 Keandikoan, terdapat 5 suku : Melayu, Patopang, Dalimo, Supanjang dan Payabadar. Kelima Suku di atas berasal dari 13 Ninik. Ninik-Ninik terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut “Nan 10 Niniek” (Kampung-kampung dalam Suku Melayu dan Patopang) Kelompok kedua disebut “Nan 3 Niniek” (Kampung-kampung yang terdapat Suku Dalimo, Supanjang dan Payabadar) (Naim, 1984). Keahlian bertenun masyarakat Silungkang dipelajari dari Pattani Thailand pada abad 11 dan mulai berkembang pesat sejak tahun 1926. Jumlah pengrajin tenun dirinci berdasarkan desa di Kecamatan Silungkang pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Jumlah Pengrajin Tenun Songket Silungkang Tahun 2012
Dirinci Menurut Desa

No	Desa	Jumlah
1	Silungkang oso	74
2	Silungkang duo	90
3	Silungkang tigo	137
4	Muaro kalaban	11

Sumber Dinas Koperindag Kota Sawahlunto

Kain Tenun Silungkang memiliki motif yang khas, dan songket yang dihasilkannya beragam mulai dari songket ikat, songket *batabua* (motif benang emas atau peraknya bertebaran, tidak memenuhi seluruh permukaan kain), penuh, benang dua, dan songket

selendang lebar (Said, 2009).Peralatan tenun songket Silungkang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni peralatan pokok dan tambahan. Keduanya terbuat dari kayu dan bambu. Peralatan pokok adalah seperangkat alat tenun itu sendiri yang oleh mereka disebut sebagai “*panta*”. Seperangkat alat yang berukuran 2 x 1,5 meter ini terdiri atas *gulungan* (suatu alat yang digunakan untuk menggulung benang dasar tenunan), *sisia* (suatu alat yang digunakan untuk merentang dan memperoleh benang tenunan), *pancukia* (suatu alat yang digunakan untuk membuat motif songket, dan *turak* (suatu alat yang digunakan untuk memasukkan benang lain ke benang dasar). *Panta* tersebut ditempatkan pada suatu tempat yang disebut *pamedangan* (tempat khusus untuk menenun songket), di depannya diberi dua buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga *kayu paso*. Gunanya adalah untuk menggulung kain yang sudah ditenun.



Gambar 6.1 Alat Tenun Bukan Mesin Tenun Silungkang

Peralatan tambahan adalah alat bantu yang digunakan sebelum dan sesudah proses pembuatan songket. Alat tersebut adalah penggulung benang yang disebut *ani* dan alat penggulung kain hasil tenunan yang berbentuk kayu bulat dengan panjang sekitar 1 meter dan berdiameter 5 cm. Bahan dasar kain tenun songket adalah benang tenun yang disebut

benang *lusi* atau *lungsin*. Benang tersebut satuan ukurannya disebut *palu*. Sedangkan, hiasannya (songketnya) menggunakan benang *makao* atau benang *pakan*. Benang tersebut satuan ukurannya disebut *pak*. Benang *lusi* dan *makao* itu pada dasarnya berbeda, baik warna, ukuran maupun bahan seratnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan ragam hias kain songket terlihat menonjol dan dapat segera terlihat karena berbeda dengan tenun latarnya.

Motif ragam hias Songket Silungkang selain dibentuk dengan benang *mas*, juga dengan benang berwarna lainnya. Oleh sebab itu, terdapat dua macam kain songket yaitu: (1) kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang *mas*; dan (2) kain songket dengan ragam hias yang dibentuk bukan dari benang yang berwarna emas. Kain songket yang motifnya dibuat dengan benang *mas* pemasarannya relatif terbatas karena harganya mahal dan pemakaiannya hanya pada saat ada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan tertentu, seperti: perkawinan, *batagakgala* (penobatan penghulu), dan penyambutan tamu-tamu penting. Sedangkan, kain songket jenis kedua yang motifnya tidak dibuat dengan benang *mas* adalah untuk memenuhi pasaran yang lebih luas karena jenis ini tidak hanya untuk busana tradisional, tetapi juga untuk bahan kemeja, selendang, taplak meja dan hiasan dinding.

Pembuatan tenun songket pada dasarnya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menenun kain dasar dengan konstruksi tenunan rata atau polos. Tahap kedua adalah menenun bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari benang *paka*. Tenun Silungkang, di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu antara lain: kesakralan, keindahan (seni), ketekunan, ketelitian, dan kesabaran (Depdikbud,

1988).

Nilai kesakralan tercermin dari pemakaiannya yang umumnya hanya digunakan pada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan upacara, seperti pernikahan, upacara *batagakgala* (penobatan penghulu) dan lain sebagainya (Depdikbud, 1988). Nilai keindahan tercermin dari motif ragam hiasnya yang dibuat sedemikian rupa, sehingga memancarkan keindahan (Depdikbud, 1988). Nilai ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tercermin dari proses pembuatannya yang memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Tanpa nilai-nilai tersebut tidak mungkin akan terwujud sebuah tenun songket yang bagus (Depdikbud, 1988).



Gambar 6.2 Hasil Kerajinan Tenun Silungkang dengan Berbagai Motif

6.2 Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang

Pengarusutamaan gender merupakan strategi agar kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari program yang dibuat sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama.

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang dalam penelitian ini belum ada ditemukan sebab belum ada kebijakan atau peraturan yang

terkait dengan gender dari hasil penelitian yang di Kota Sawahlunto. Hal ini sesuai dengan keterangan dari hasil wawancara dengan kepala bidang industry Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja Kota Sawahlunto¹⁶:

Belum ada diterapkan kebijakan atau peraturan di Kota sawahlunto yang terkait dengan gender....

Dalam pelaksanaan penelitian tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang terdapat beberapa langkah dalam menerapkan pengarusutamaan gender dalam memformulasikan kebijakan, yaitu:

1. Perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan

Dalam tahapan perencanaan seyogyanya dilakukan upaya-upaya untuk menelaah dan menelusuri data yang terkait dengan statistik jumlah penduduk di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto berdasarkan kesempatan kerja yang dibagi berdasarkan jenis kelamin sehingga diketahui jumlah secara keseluruhan dan juga perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Dari temuan di lapangan, sampai dengan penelitian ini dilakukan, jumlah penduduk berdasarkan kesempatan kerja yang tercatat dalam statistik Kecamatan Silungkang belum dibukukan dengan baik sehingga berdasarkan hal tersebut perumusan kebijakan pengelolaan tenun Silungkang relatif sulit untuk diformulasikan dalam waktu dekat. Data yang ditemukan dalam “Buku Kecamatan Silungkang dalam Angka Tahun 2006” (belum ada edisi terbaru) adalah Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang dirinci menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006, sebagai berikut:

Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	485	495	980
5-9	493	488	981

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Industri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja Tanggal 10 Oktober 2012

10-14	462	490	952
15-19	467	483	950
20-24	316	347	663
25-29	323	388	711
30-34	323	380	703
35-39	353	378	731
40-44	299	331	630
45-49	248	264	512
50-54	152	173	325
55-59	144	169	313
60-64	129	162	291
65 ke atas	217	320	537
Total	4411	4868	9279

Sumber: BPS Kota Sawahlunto 2006

Meskipun secara statistik jumlah penduduk Kecamatan Silungkang berdasarkan kesempatan kerja belum ada, namun setidaknya dari data tersebut di atas dapat ditelusuri bahwa jumlah penduduk berdasarkan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan berkisar pada usia 20-54 tahun dengan jumlah laki-laki adalah 2014 jiwa dan perempuan 2261 jiwa. Perbandingan tersebut relative seimbang sehingga perencanaan pengarusutamaan gender termasuk dalam formulasi kebijakan pengelolaan tenun Silungkang.

2. Penerapan

Tahapan berikutnya adalah penerapan, maksudnya adalah penerapan kebijakan yang nantinya dilahirkan harus sesuai dengan kebutuhan perempuan atau laki-laki dalam program kerja tersebut dalam hal ini adalah pengelolaan tenun Silungkang, sehingga mereka harus terlibat dalam manajemen kegiatan. Pengelolaan tenun Silungkang di lapangan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, mereka terlibat dalam setiap proses pengelolaan tersebut mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan pengrajin tenun menjelaskan bahwa proses pengerjaan tenun Silungkang dari tahapan produksi sampai

dengan pemasarannya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan meskipun pada tahapan tertentu pengerjaannya relatif dominan dilakukan oleh perempuan misalnya proses menenun benang menjadi tenun Silungkang.

Lebih jauh informan tersebut menjelaskan bahwa pengrajin tenun menjual hasil tenun tidak langsung kepada masyarakat namun kepada agen atau istilah lainnya “bos”. Agen ini yang nantinya akan memasarkan tenun Silungkang secara luas tidak saja di Kota Sawahlunto tapi tersebar ke berbagai daerah bahkan luar negeri seperti Malaysia.



Gambar 6.3 Toko Penjualan Hasil Tenun Silungkang

Penerapan dalam tahapan ini tidak hanya terkait dengan program atau rencana kerja yang mengutamakan gender seperti pengelolaan kerajinan tenun Silungkang dan pengrajin yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, akan tetapi dalam hal ini juga terkait dengan koordinasi yang dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat dan juga *stake holders*. Koordinasi yang dilakukan terutama sekali dengan Pemerintah Kota Sawahlunto terutama Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja . Selanjutnya juga dilakukan koordinasi dengan KAN Silungkang dan tokoh masyarakat

termasuk dengan perantau atau yang dikenal dengan organisasi Persatuan Keluarga Silungkang (PKS). Mengenai PKS ini sebenarnya dalam kerajinan tenun Silungkang perantau banyak membantu pengrajin untuk memasarkan dan mempromosikan tenun Silungkang di daerah-daerah lain bahkan mereka juga ikut memberikan bantuan berupa modal dan bahan baku kepada pengrajin tenun yang ada di Silungkang.

Sejauh ini koordinasi yang dilakukan antara pengrajin tenun dengan Pemerintah Kota Sawahlunto bukanlah dalam rangka pengarusutamaan gender dalam pengelolaan tenun Silungkang, akan tetapi sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah kepada masyarakat untuk membantu dan mensejahterakan masyarakatnya sehingga berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota sawahlunto untuk memajukan kerajinan tenun Silungkang.

Menurut penuturan Kepala Bagian (Kabag) Industri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, Pemerintah telah memberikan bantuan modal, pelatihan dan pengembangan SDM, promosi dan pemasaran kerajinan tenun Silungkang (merujuk pada PERWAKO Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial).

Menurutnya bantuan modal yang diberikan yaitu melalui koperasi (mitra usaha), bantuan bahan baku termasuk menyediakan peralatan untuk bertenun yaitu Alat Tenun Mesin (ATM), promosi dan pemasaran kerajinan tenun Silungkang juga dilakukan oleh Pemerintah misalnya dengan keberadaan kampung wisata dan kampung tenun, kemudian juga dalam event Sawahluntto expo, Padang Fair dan juga Jakarta Fair. Kemudian

dilakukan pula pelatihan desain atau motif tenun yang baru meskipun sekarang relatif sudah tidak dilakukan lagi, seperti penuturan salah seorang pengrajin tenun¹⁷:

Pelatihan-pelatihan ada dilakukan oleh Pemerintah, kalau dulu diadakan rutin dua kali dalam setahun. Kalau sekarang sudah jarang, pelatihan kadang dilakukan di rumah saja, ke rumah orang yang sudah lama bertenun kemudian setelah bisa di bawa ke rumah masing-masing...

Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Pemerintah Kota sawahlunto dalam pengelolaan tenun Silungkang belum merujuk pada lahir suatu kebijakan tenun yang mengutamakan gender tetapi lebih kepada bentuk implementasi dari Peraturan Walikota (PERWAKO) Nomor 48 tahun 2011 tersebut di atas.

3. Partisipasi

Yang dimaksud dengan partisipasi dalam tahapan ini adalah siapa yang menjadi target, apakah perempuan atau laki-laki dan perempuan. Siapa yang menjadi partisipannya, tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan harus disusun berdasarkan catatan administratif sebagai komponen penting dalam memahami respon laki-laki dan perempuan dalam kebijakan tersebut. Siapa yang akan memperoleh manfaatnya?. Terkait dengan pengelolaan tenun Silungkang keterlibatan (target) masyarakat secara umum dapat dijumpai di lapangan, namun bukan untuk menerapkan pengarusutamaan gender yang nantinya melahirkan suatu kebijakan yang berbasis gender. Tahapan ini dilakukan untuk peningkatan pengelolaan tenun sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tujuan akhir antara pengarusutamaan gender dengan kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat relatif sama namun sasaran dalam pengarusutamaan gender adalah keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Wirna, 61 Tahun, Silungkang 3, Tanggal 5 Oktober 2012

Sawahlunto belum mengakomodasi kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan gender.

Sementara dari segi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pengrajin tenun merupakan realisasi dari Peraturan Walikota dalam pemberian hibah atau bantuan sosial dan bukan bentuk dari implementasi kebijakan pro gender. Menurut penuturan tokoh masyarakat Silungkang dalam wawancaranya bahwa keberadaan kampung wisata merupakan salah satu kebijakan promosi tenun secara tidak langsung karena sebenarnya kampung wisata tidak hanya mempromosikan tenun akan tetapi juga hal lain yang terkait di dalamnya seperti keberadaan stasiun kereta api, adat istiadat Silungkang dan lain sebagainya.



Gambar 6.4 Kampung tenun Silungkang, Kota Sawahlunto

Lebih jauh informan yang merupakan tokoh masyarakat di Silungkang ini menuturkan bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya dapat dilakukan dengan mengemukakan pendapat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto agar dalam pengelolaan tenun Silungkang dapat dibantu manajemennya oleh pemerintah daerah sehingga nantinya masing-masing

pengrajin dapat mengelola tenun secara mandiri, tidak seperti saat ini, pengrajin tenun hanya menenun tanpa mampu untuk memasarkan hasil karya sendiri sebab terkendala masalah manajemen keuangan, sumber daya manusia dan persaingan sehat dalam memasarkan kerajinan tersebut.

4. Manajemen

Dalam hal ini dilihat jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengorganisasian dan pengawasan adalah indikator partisipasi perempuan dalam manajemennya. Melakukan advokasi efektif kepada agen-agen pengarusutamaan gender di semua tingkatan nasional sampai ke kabupaten/ kota untuk menjamin proses pengarusutamaan gender dan kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan kegiatannya akan meningkatkan program responsif gender. Upaya ini belum terlihat jelas sebab Pemerintah Kota Sawahlunto memang belum mengakomodasi lahirnya suatu kebijakan yang responsif gender terutama yang terkait dengan pengelolaan tenun Silungkang, seperti penuturan Kabag Industri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja¹⁸:

Dalam kebijakan Kota Sawahlunto sendiri belum ada kebijakan yang mengkhususkan untuk tenunan Silungkang dan juga belum ada peraturan mengenai gender...

Dari keterangan di atas maka sulit untuk melihat diterapkannya gender dalam suatu kebijakan pemerintah terutama yang terkait dengan pengelolaan tenun. Meskipun dari keterangannya bahwa 90 persen dari pekerja tenun adalah perempuan namun hal tersebut belum menjamin bahwa pengarusutamaan gender diterapkan dalam kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto karena rujukan pengelolaan tenun yang dilakukan oleh Pemerintah

¹⁸ Wawancara Tanggal 10 Oktober 2012

sampai saat ini adalah PERWAKO Nomor 48 Tahun 2011 yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial. Dalam PERWAKO itu sendiri juga tidak ditemukan pasal yang membicarakan tentang bantuan terhadap kerajinan tenun Silungkang melainkan bantuan sosial dan hibah dalam bentuk umum.

Pengerjaan kerajinan tenun Silungkang sejatinya lebih dinilai sebagai budaya atau kebiasaan turun temurun bagi perempuan Minangkabau khususnya di Silungkang sehingga pengerjaan kerajinan tenun untuk lingkup yang lebih luas secara tidak langsung dinilai sebagai suatu hal yang belum bisa diterima oleh masyarakat misalnya ketika kerajinan tenun ini dikelola secara profesional dan bernilai ekonomis. Perempuan pengrajin tenun lama kelamaan menjadi terpinggir apalagi setelah diterapkannya tenun dengan menggunakan alat tenun mesin (ATM) yang umumnya dioperasikan oleh kaum laki-laki.

Belum adanya kebijakan atau Peraturan Daerah yang terkait dengan gender diasumsikan karena faktor stratifikasi budaya masyarakat, tenun merupakan suatu kerajinan yang dilakukan oleh perempuan—ketika bernilai ekonomis maka lahan tersebut menjadi kewenangan kaum laki-laki. Stigma ini sebenarnya dapat diubah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk kepekaan pemerintah Kota Sawahlunto, misalnya melibatkan perempuan dalam koperasi wanita yang dikelola oleh bagian koperasi di Dinas terkait sehingga penyaluran kemampuan perempuan mulai dari memproduksi sampai dengan memasarkan kerajinan tenun ini terakomodasi dengan baik melalui koperasi wanita. Akhirnya faktor budaya dan stigma dalam masyarakat selama ini yang meminggirkan perempuan dalam peran ekonomi lebih menghargai dan menghormati kerja keras dan usaha perempuan.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif mengenai kebijakan atau program responsif gender. Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun indikator output yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan. Ada kebutuhan indikator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif mempersempit atau meminimalisasi kesenjangan gender.

Dalam pengelolaan tenun Silungkang belum ada kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto yang responsif gender bahkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, belum ada suatu kebijakan atau peraturan daerah di Kota Sawahlunto yang mengacu kepada pengarusutamaan gender sehingga sulit untuk mengetahui pengarusutamaan gender sudah berjalan dengan efektif atau belum dalam pengelolaan tenun Silungkang.

Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto terutama yang berhubungan dengan kerajinan tenun Silungkang, bahwa tanpa kebijakan yang pro gender pun pengelolaan tenun Silungkang sudah dilakukan oleh sebahagian besar kaum perempuan. Menurut hemat penulis hal tersebut belum menjamin pelaksanaan kebijakan pro gender berlangsung dengan baik, karena parameter kebijakan yang responsif gender tidak saja dinilai berdasarkan kuantifikasi perbedaan kaum laki-laki dengan perempuan namun juga hal lain yang terkait dengan peranan dan manfaat yang diperoleh oleh kaum perempuan. Apalagi jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah maka Pemerintah Kota Sawahlunto dinilai belum maksimal dalam menjalankan peraturan pro gender.

6.3 Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Sawahlunto (khususnya Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang)

Menurut pasal 1 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, Pengarusutamaan gender (PUG) di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan definisi di atas seyogyanya dalam setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah yang nantinya diturunkan menjadi program kerja atau kegiatan bagi kepentingan masyarakat harus responsif gender. Hal ini bertujuan agar terwujud kesetaraan gender di daerah-daerah di Indonesia. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam setiap pembangunan di daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi harus berperspektif gender termasuk dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam realisasinya diharapkan bahwa setiap aparatur pemerintah daerah mampu untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing (sesuai dengan ketentuan pasal 13 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008).

Adapun tujuan dari pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah adalah, pertama, memberikan acuan bagi aparat pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Kedua, mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Ketiga, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Keempat, mewujudkan anggaran daerah yang responsive gender. Kelima, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Dari tujuan tersebut maka dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di daerah untuk peningkatan pembangunan yang berspektif gender misalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan PUG di Kabupaten/ Kota menjadi tanggungjawab Bupati/ Walikota. Kepala daerah tersebut membentuk Kelompok Kerja (POKJA) PUG dengan tugas (Pasal 15 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008):

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada camat, kepala desa, lurah
- c. Menyusun program kerja setiap tahun
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender
- e. Menyusun rencana kerja POKJA PUD setiap tahun

- f. Bertanggungjawab kepada bupati/ walikota dan wakil bupati/ wakil walikota
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/ walikota
- h. Memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kabupaten dan kota
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
- k. Menyusun rencana aksi daerah (RAdorong NDA) PUG di kabupaten/ kota
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD.

Terkait dengan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dalam pembangunan daerah di Kota Sawahlunto khususnya dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang industri Dinas Pertambangan, industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, bahwa mereka belum mengetahui Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang diatur oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tersebut. Berikut penuturannya¹⁹:

Kita tidak mengetahui Permendagri yang mengatur tentang gender, tapi kalau keterlibatan perempuan dalam tenun Silungkang sudah berjalan sejak lama bahkan turun temurun jadi tidak perlu diatur permedagri juga sudah banyak penenun perempuan...kalau ditanya ke DPRD pun tidak ada perda tentang kerajinan tenun apalagi tentang gender...

Ketika ditanya lebih lanjut kenapa tidak ada Perda yang mengatur tentang kejinan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto sementara Perda tentang tambang ada diatur, informan tersebut menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena tenun merupakan kerajinan turun temurun dan lebih bersifat kepada pengembangan kebudayaan dan

¹⁹ Wawancara Tanggal 10 Oktober 2012

adat istiadat dan hasil dari kerajinan tenun tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto namun hanya masuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu penambahan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dan penambahan barang di dalam masyarakat berbeda dengan tambang yang masuk ke dalam PAD.

Sebenarnya apabila dicermati dengan baik kerajinan tenun Silungkang dewasa ini berpotensi menambah PAD Kota Sawahlunto, sebab perkembangannya semakin pesat bahkan penjualannya sampai ke luar negeri. Keseriusan agar kerajinan tenun tersebut mampu menambah PAD tentu dengan melahirkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaannya mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan pajak yang dikenakan karena penjualan tenun tersebut termasuk melindungi hak cipta tenun Silungkang dengan mematenkan tenun Silungkang sebagai asset masyarakat Silungkang dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Sawahlunto. Selanjutnya *political will* dari Pemerintah Kota Sawahlunto juga sangat diperlukan meskipun secara data statistik belum penulis temukan dalam penelitian ini, namun dari wawancara yang dilakukan dengan pengrajin tenun dan tokoh masyarakat Silungkang, bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto secara politis terkesan berusaha menjadikan agar tenun yang dikelola tersebut dinamakan dengan tenun Sawahlunto dan bukan tenun Silungkang sebab pusat pemerintahan Kota Sawahlunto berada di Sawahlunto bukan Silungkang. Berikut petikan wawancara penulis dengan salah seorang informan yang merupakan tokoh masyarakat²⁰:

Usaha untuk pengembangan tenun ini ada dilakukan misalnya diskusi masyarakat dengan pemerintah, pelatihan dan lain-lain namun kadang ada upaya agar tenun Silungkang ini lebih ditonjolkan menjadi tenun Sawahluntoitu secara tidak

²⁰ Wawancara dengan Ikhsan 32 tahun, tanggal 5 Oktober 2012

langsung disampaikan dalam diskusi... padahal itu adalah kerajinan nenek moyang kami dan turun temurun...memang usaha ke sana ada dengan mengalihkan tenun dengan alat tenun mesin di daerah Lunto tapi kami tetap melakukan tenun dengan cara tradisional...

Kondisi di atas yang membuat pengrajin tenun Silungkang untuk tidak terlalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kota Sawahlunto dan lebih memilih untuk bekerjasama dengan pemodal (agen) atau mendapat pinjaman modal dari PKS.

Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan gender di daerah belum diterapkan di Kota Sawahlunto khususnya pada SKPD Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja. Lebih lanjut belum ada peraturan daerah atau peraturan walikota yang mengatur tentang gender di Kota Sawahlunto, sehingga sulit untuk dilihat bagaimana penerapan Permendagri tersebut karena sama sekali belum dilaksanakan. Hal ini cukup ironis karena pengarusutamaan gender sudah diatur mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dan alokasi dana untuk kegiatan tersebut terdapat dalam APBN atau APBD sehingga semestinya dilakukan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia.

Faktor lain yang menyebabkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 belum bisa diimplementasi di Kota Sawahlunto adalah lemahnya kecermatan dari Pemko Sawahlunto terhadap pengarusutamaan dalam setiap kebijakan yang dilahirkan, di antara hal tersebut dikarenakan jumlah anggota DPRD Kota Sawahlunto relative sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD laki-laki (kurang dari 15 persen total jumlah anggota DPRD). Kemudian minimnya pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kepada masyarakat, padahal dalam program tersebut harus terdapat unsur-unsur pengarusutamaan gender dalam

setiap kegiatan yang dilakukan. Lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan, factor manajerial juga mempengaruhi pengarusutamaan gender dalam suatu kebijakan atau program kegiatan pemerintah—jumlah pejabat eselon perempuan yang menempati posisi strategis di SKPD Pemerintah Kota Sawahlunto relatif lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, hal ini juga menyebabkan pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi terhambat.

Kondisi ini harusnya menjadi catatan penting bagi semua elemen Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang benar-benar mampu diterapkan oleh pemerintah daerah atau jika belum terlaksana perlu pengawasan dan evaluasi bagi daerah tersebut karena kelalaian pemerintah daerah dapat merugikan masyarakat.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto belum teregulasi dengan baik namun dalam implementasi pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh masyarakat Silungkang telah sejak lama menjadikan pengelolaan tenun sebagai tanggungjawab semua masyarakat termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun tersebut. Meskipun pengelolaan kerajinan tenun Silungkang belum diatur dalam regulasi, Pemerintah Kota Sawahlunto tetap memberikan bantuan kepada pengrajin tenun Silungkang dengan memberikan bantuan berupa hibah dan bantuan sosial lainnya yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Petausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Kemudian Pemerintah Kota Sawahlunto juga menggalakkan kampong tenun dan kampong wisata dalam rangka promosi tenun Silungkang dan lebih luas lagi dengan mengikuti event-event seperti Sawahlunto Expo, Padang Fair dan Jakarta Fair sehingga semua orang akhirnya mengetahui keberadaan dan potensi tenun Silungkang. Di antara perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota sawahlunto tidak luput dari kelemahan misalnya pengawasan tentang bantuan yang diberikan apakah bermanfaat bagi masyarakat kemudian juga belum adanya upaya untuk mengangkat tenun Silungkang menjadi suatu komoditas barang perekonomian yang menjanjikan bagi perkembangan PAD Kota Sawahlunto ke depan misalnya melalui hak paten Tenun Silungkang dan lain sebagainya. Pelaksanaan

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 juga belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sehingga belum ditemukan Peraturan daerah atau regulasi lain yang terkait dengan gender. Mengenai hal ini Pemerintah pusat seharusnya melakukan koordinasi dan pengawasan yang baik ke daerah-daerah di Indonesia terutama yang terkait dengan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah demi kelangsungan pembangunan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.2 Saran

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi dalam upaya pencapaian kehidupan dan pembangunan masyarakat lebih baik. Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah sudah membuat regulasi dan melakukan program atau kegiatan pemerintahan yang responsive gender. Pemerintah daerah sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan masyarakat di daerah harusnya peka dengan persamaan dan keadilan masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang. Kerajinan tenun Silungkang meskipun sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Silungkang khususnya perempuan bukan berarti dalam pengelolaannya tidak memerlukan kebijakan pro gender sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto harus melahirkan regulasi yang berbasis gender termasuk dalam pengelolaan tenun Silungkang. Selanjutnya Pemerintah Kota Sawahlunto juga memperhatikan instruksi atau aturan yang lebih tinggi agar diterapkan di daerahnya sebab semua itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Widayani S. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas
- Aryana. (2008). *Etos Kerja Dan Diversifikasi Pekerjaan Perempuan Pada Masyarakat Pengrajin Di Desa Tojan – Klungkung*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
- Boestami (1990). *Peran Dan Kedudukan Wanita Dalam Adat Minangkabau*. Bukittinggi : Lubukagung
- Creswell, W.John. 2011. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Elfindri, Ayunda, & Saputra (2010). *Minang Entrepreneurship*. Jakarta : Baduose Media
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press
- Giddens, A. (1986). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern suatu Analisis Karya-karya Marx, Durkheim dan Max Weber*. (Soeheba Kramadibrata Penerjemah). Jakarta: UI Press
- Iskandarini (2011). *Kewirausahaan*. Medan : Usupress
- Lasmawan, Wayan (2006). *Etos Kerja Wanita Pedagang Acung Dan Kebertahanan Nilai-Nilai Sosial-Ritual Masyarakat Bali (Studi Kasus Pada Para Pedagang Acung Wanita Di Kawasan Sentral Kunjungan Wisata Di Provinsi Bali)*.
- Rahman, Lisabona dkk. 2005. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Woman Research Institute
- Reza (2011) *Akan Lahir Songket Silungkang Modern Di Tangan Pengrajin Lokal* [On-line] (<http://www.dekranasda-sawahlunto.com/berita-artikel/51-akan-lahir-songket-silungkang-modern-di-tangan-pengrajin-lokal.html>. Akses Tanggal 23 Desember 2011)

Safutra (2011). *Tenun Silungkang Yang Mulai Terlupakan*. [On-line] ([http://www.Padangtoday.com/Berita Tenun Silungkang Terancam Kehilangan Penggiat Terampil _ Padang Today - Minangkabau Di Dunia Maya.htm](http://www.Padangtoday.com/Berita_Tenun_Silungkang_Terancam_Kehilangan_Penggiat_Terampil_Padang_Today_Minangkabau_Di_Dunia_Maya.htm)). Diakses pada tanggal 5 Desember 2011)

Said, Nawir (2009). *Songket Silungkang Ditenun Penuh Penjiwaan Seni dan Budaya*. Jakarta; Citra Kreasindo

Siti HaritiSasrini. 2009.*Gender and Politics*.Yogyakarta: Tiara Wacana PSW UGM